

# PUBLIK

## DPRD Tanah Datar Tinjau Lokasi Proyek MPP Yang Terbengkalai

Joni Hermanto - [TANAHDATAR.PUBLIK.CO.ID](http://TANAHDATAR.PUBLIK.CO.ID)

Jan 18, 2023 - 10:36



Foto : Dok. Humas Pemkab Tanah Datar

**TANAH DATAR** - Mangkraknya proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di jantung Kota Batusangkar yang diduga ditinggal pergi tanpa pesan oleh pelaksana sekaligus pimpinan CV. Temika Jaya Utama, Harianto (ari), Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar langsung turun ke lokasi pada Selasa, 17/ 01-2023.

Wakil Ketua DPRD Anton Yondra.SE mengatakan, " ketika kami menyikapi laporan terkait mangkraknya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), kami langsung memanggil institusi terkait. Dinas PU, Asisten II, Kabag Hukum, termasuk AP.

Jadi kami meminta kronologis secara tertulis sebagai bahan untuk dijadikan pegangan. Dan saat ini sudah ada pemutusan hubungan kontrak dengan CV. Temika Jaya Utama tertanggal 13 /01,

Dari tanggal 13 tersebut kalau ada administrasi-administasi yang harus diselesaikan tentu itu kita minta, pertama jaminan sebanyak tujuh juta rupiah termasuk dendanya itu sendiri, kalau itu tidak dilaksanakan berarti ada administrasi secara regulasinya tidak bisa perusahaan ini dipakai atau di black list beserta pimpinannya.

Untuk itu seluruh kegiatan yang ada di Tanah Datar tendernya nantik jangan lagi yang terendah, tetapi lihat dulu kualitasnya, lihat orangnya dan lihat pula keningnya.

Kadang-kadang kita selama ini hanya mengejar tawaran terendah, kalau dapat yang menang tender itu perusahaan-perusahaan lokal tetapi sesuai dengan aturan". Sampai Anton

"Ditambahkan Anton tahun ini kita di DPRD menganggarkan kembali dari APBD sebanyak tiga ratusan itupun untuk finishing". Katanya.

Disamping itu Asisten II bagian EKP Abdul Hakim menyampaikan tentang perpanjangan waktu yang diberikan terhadap perusahaan secara aturannya tidak ada tetapi dalam perpres dibolehkan sepanjang PPK menyakini mampu menyelesaikannya.

Jadi diwaktu PPK meminta perpanjangan waktu kepada pimpinan ke asisten II EKP akan mengembalikan ke PU untuk mengkaji justifikasi teknis untuk perpanjangan. Untuk teknisnya tentu PU yang lebih mengetahui dimana ketika PPK itu berkeyakinan menyelesaikan pekerjaan ini" Sampainya.**(JH)**